

Penguatan Kelembagaan Pokja Kampung Moderasi Beragama Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman

DOI: <https://doi.org/10.32509/abdimoestopo.v9i2.7336>

Muhammad Taufik, Muthia Ulfah*

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Sungai Bangek, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat,
Indonesia

*Email Korespondensi: muthiaulfah@gmail.com

Abstract - The establishment of Religious Moderation Villages (KMB) constitutes a strategic initiative within the Ministry of Religion's priority programs. To operationalize this initiative, a multi-tiered KMB Working Group (Pokja) was established, spanning from the national to the sub-district level, serving as the primary coordinating body for the program's implementation. Despite its formal inception in July 2023, the KMB program has yet to achieve optimal functionality, primarily due to the Working Group's limited capacity in formulating structured work plans and the absence of allocated financial resources. Accordingly, the objective of this initiative is to provide facilitative support to the KMB Working Group in developing comprehensive work plans and identifying alternative financial sources to ensure program sustainability. To achieve this, the initiative employs the Community Based Research (CBR) method as a systematic approach for decision-making and resource mapping. The expected outcomes of this initiative include the production of strategic planning documents for the Batang Anai KMB Working Group, alongside instruments for evaluating religious moderation efforts within the community.

Keywords: Institutional Strengthening; Religious Moderation Village; Strategic Planning

Abstrak - Pembentukan Kampung Moderasi Beragama (KMB) adalah salah satu program prioritas Kementerian Agama. Untuk melaksanakan program tersebut Kementerian Agama membentuk Kelompok Kerja (Pokja) KMB secara bertingkat mulai dari level pusat hingga kecamatan yang sekaligus menjadi ujung tombak pelaksanaan program KMB. Meskipun sudah didirikan sejak Juli 2023, program KMB di Nagari Sungai Buluah Barat Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini terutama disebabkan oleh keterbatasan Pokja KMB dalam menyusun rencana kerja yang terstruktur serta ketidaktersediaan anggaran untuk melaksanakan program KMB itu sendiri. Pengabdian ini bertujuan untuk mendampingi Pokja KMB dalam menyusun rencana kerja dan memetakan sumber keuangan alternatif untuk menjalankan program KMB. Menggunakan metode Community Based Research (CBR), pengabdian ini memfasilitasi Pokja KMB dalam menghasilkan dokumen rencana strategis Pokja KMB Kecamatan Batang Anai dan instrumen evaluasi moderasi beragama yang dapat digunakan Pokja dalam mengukur tingkat keberhasilan program KMB. saran kepada Pokja KMB untuk dapat menjalankan program-program yang sudah direncanakan dengan baik. Pihak-pihak yang berkepentingan juga diharapkan dapat saling mendukung dan bersinergi dalam memelihara kerukunan dan kedamaian di Nagari Sungai Buluah Barat.

Kata Kunci: Penguatan Kelembagaan; Kampung Moderasi Beragama; Rencana Strategis

I. PENDAHULUAN

Pembentukan Kampung Moderasi Beragama (KMB) adalah salah satu program besar Kementerian Agama pada tahun 2023. KMB ialah desa atau kelurahan yang masyarakatnya memiliki cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang moderat dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional (Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 137 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pembentukan Kampung Moderasi Beragama, 2023). Tujuan dibentuknya KMB adalah untuk membangun paradigma serta kesadaran masyarakat supaya mempraktikkan perilaku beragama yang moderat. Pembentukan KMB menjadi salah satu strategi mempromosikan nilai-nilai moderasi beragama melalui kolaborasi lembaga pemerintah dengan lembaga masyarakat, tokoh agama, dan *stakeholder* yang lain dalam mewujudkan keharmonisan dan kedamaian hidup beragama serta menghindari eksklusivisme yang merusak kerukunan (Lestari, 2024). Hal ini merupakan wujud dari peranan pemerintah dalam memfasilitasi setiap warga negara untuk beragama dan menjalankan agamanya sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Nagari Sungai Buluah Barat merupakan salah satu KMB di Provinsi Sumatera Barat yang mencerminkan kemajemukan kehidupan bermasyarakat. Meskipun didominasi oleh muslim, desa ini juga memiliki penduduk yang beragama Kristen dan Katolik. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat hidup berdampingan dengan harmonis. Kendatipun demikian, pergesekan terkadang tidak dapat dihindari. Salah satunya, konflik terkait ternak babi masyarakat Nias yang terus berulang. Dalam penelitian Ashadi, setidaknya konflik tentang ternak babi telah terjadi pada tahun 2001, berulang kembali pada tahun 2006, 2009, dan 2016 (Ashadi et al., 2022).

Sejumlah kajian terdahulu mencermati keharmonisan dan kerjasama antar etnis di Sungai Buluah Barat disebabkan oleh beberapa faktor. Penelitian Amalia dkk menekankan pada sikap toleransi dan saling menghormati perbedaan di antara masyarakat serta kepemimpinan pemerintah desa dalam menciptakan keadilan dan keharmonisan (Amalia et al., 2019). Sementara itu, penelitian Ashadi dkk mencermati peran penting Kerapatan Adat Nagari dalam memediasi musyawarah dan mufakat untuk penyelesaian konflik yang sewaktu-waktu dapat terjadi dan sekaligus melindungi kelompok minoritas (Ashadi et al., 2022). Pengabdian Ulfah & Fitria memfokuskan pada penguatan Kelompok Kerja (Pokja) KMB sebagai penanggungjawab pengarusutamaan moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Pendekatan yang dilakukan adalah sosialisasi dan asistensi untuk meningkatkan pemahaman anggota Pokja tentang moderasi beragama serta Kampung Moderasi Beragama sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan fungsinya untuk membangun dan menjaga keharmonisan hidup bermasyarakat di Sungai Buluah Barat (Ulfah & Fitria, 2024). Berbeda dengan pengabdian sebelumnya, pengabdian ini fokus pada penguatan kelembagaan Pokja.

Pokja KMB adalah gugus tugas yang dibentuk untuk mewujudkan tujuan KMB. Pokja KMB Kecamatan Batang Anai dibentuk pada 26 April 2023 melalui SK Kepala KUA Kecamatan Batang Anai Nomor 149 Tahun 2023. Pokja diketuai oleh Kepala KUA Batang Anai dan beranggotakan 12 orang yang terdiri dari penyuluh agama, tokoh agama Islam, Kristen dan Katolik, serta tokoh adat di Nagari Sungai Buluah Barat. Sesuai dengan instruksi Kementerian Agama, Pokja meluncurkan Kampung Moderasi Beragama di Nagari Sungai Buluah Barat pada tanggal 26 Juli 2023. Setelah *launching*, Pokja telah menyusun profil KMB Sungai Buluah Barat, melakukan FGD dengan *stakeholder* untuk mendapatkan dukungan, dan sudah mulai melakukan sosialisasi moderasi beragama. Meskipun sudah memiliki progres kegiatan, sebagai sebuah lembaga yang baru, Pokja KMB masih memiliki persoalan dalam mendisain rencana kerja yang tepat dan terstruktur. Selain itu, Pokja KMB juga tidak memiliki anggaran khusus untuk menjalankan kegiatan KMB.

Pokja KMB Kecamatan Batang Anai merupakan sebuah organisasi yang memiliki struktur yang disahkan melalui SK Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman. Menurut Robbins & Coulter, organisasi memiliki tiga karakteristik yang umum, yaitu: tujuan yang jelas, orang-orang, dan struktur yang disengaja. Lebih lanjut, Robbins & Coulter menyebutkan bahwa proses pengaturan organisasi harus mencakup 4 aspek, yaitu: *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *leading* (kepemimpinan) dan *controlling* (pengawasan dan evaluasi) (Robbins & Coulter, 1999).

Sebagai sebuah organisasi, Pokja KMB memiliki tujuan, orang-orang, serta struktur yang jelas. Oleh sebab itu, mereka diharapkan dapat menjalankan manajemen organisasinya dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. *Planning*, *organizing*, *leading* dan *controlling* merupakan aspek penting dalam manajemen organisasi yang tidak dapat tidak harus dijalankan oleh Pokja KMB. Pokja harus dapat mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuannya di tengah hambatan dan tantangan yang dihadapi. Untuk itu, Pokja KMB harus memiliki perencanaan strategis.

Rencana strategis merupakan perencanaan yang menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dalam jangka waktu tertentu (Sakir et al., 2024). Perencanaan strategis perlu disusun Pokja untuk merancang program-program strategis agar tujuan organisasi tercapai. Begitu juga dengan monitoring dan evaluasi yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perencanaan strategis. Monitoring dan evaluasi diperlukan untuk melihat sejauh mana pencapaian organisasi dan yang tidak kalah penting adalah saran perbaikan untuk menjadi lebih baik ke depannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, pengabdian ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan Pokja KMB Kecamatan Batang Anai agar dapat tugasnya untuk menciptakan dan memelihara kerukunan dan kedamaian di Nagari Sungai Buluah Barat. Penguatan kelembagaan dilakukan khususnya pada aspek perencanaan strategis yang melibatkan berbagai stakeholder di dalamnya. Perumusan rencana strategis KMB secara partisipatif dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dapat menjadi ajang untuk memperkuat komitmen dan dukungan semua pihak untuk menjaga merukunan dan kedamaian di Nagari Sungai Buluah Barat.

Selain itu, pengabdian ini menawarkan model penguatan kelembagaan Kampung Moderasi Beragama berbasis *Community Based Research (CBR)* dan *stakeholder collaboration*. Model ini bukan sekadar penerapan CBR secara normatif, melainkan integrasi sistematis antara CBR dengan tiga instrumen analisis kelembagaan yang saling melengkapi, yaitu analisis SWOT untuk memetakan kondisi internal dan eksternal, analisis *stakeholder* untuk memetakan mitra strategis, dan *Logical Framework Analysis (LFA)* untuk menerjemahkan hasil kedua analisis tersebut menjadi rencana strategis. Sifat generik model ini terletak pada tahapan dan instrumennya yang tidak bergantung pada konteks keagamaan atau kondisi sosial spesifik Nagari Sungai Buluah Barat, sehingga dapat diadopsi langsung oleh Pokja KMB di wilayah lain yang menghadapi persoalan serupa, yaitu lemahnya kapasitas perencanaan kelembagaan dan ketiadaan anggaran kegiatan. Dengan demikian, model ini menawarkan kerangka kerja yang dapat direplikasi secara luas, menjadikan pengabdian ini tidak hanya menyelesaikan persoalan lokal Pokja KMB Kecamatan Batang Anai, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan pendekatan penguatan kelembagaan KMB secara nasional.

II. METODE PELAKSANAAN

Penguatan kelembagaan KMB Nagari Sungai Buluah Barat dilaksanakan dari bulan Juni hingga November 2024. Proses pengabdian ini meliputi proses diskusi bersama Anggota Pokja KMB serta FGD yang melibatkan *stakeholder* untuk mendukung program KMB.

Stakeholder yang dilibatkan dalam pengabdian ini meliputi Kemenag Kabupaten Padang Pariaman, pemerintah nagari, tokoh agama, dan tokoh adat.

Pengabdian ini menggunakan metode *Community Based Research* (CBR). CBR biasanya digunakan untuk menciptakan perubahan sosial di masyarakat. CBR merupakan penelitian dimana komunitas dan perguruan tinggi berkolaborasi dengan orientasi aksi guna mewujudkan keadilan sosial (Susilawaty et al., 2016). Hal ini sesuai dengan tujuan jangka panjang pengabdian ini, yaitu mewujudkan masyarakat Nagari Sungai Buluah Barat yang moderat sehingga tercipta kedamaian yang berkeadilan sosial dan berkelanjutan. Pengabdian CBR dapat menghasilkan pengetahuan yang relevan dan bermanfaat bagi komunitas seperti: dokumen, rekomendasi kebijakan, atau produk. Dalam konteks pengabdian ini, pengabdi dan Pokja KMB berkolaborasi untuk menghasilkan dokumen rencana strategis dan instrumen evaluasi KMB. Oleh karena itu, CBR adalah pendekatan yang lebih tepat digunakan dalam pengabdian ini.

PKM CBR melalui empat tahapan, yaitu *laying foudation*, *planning*, *information gathering & analysis* dan *acting on finding*. Pada *laying foudation* dilakukan proses diskusi mengenai tujuan dan pembagian peran secara bersama-sama antara pengabdi dan Pokja KMB. Selain itu, pada tahapan ini juga disepakati prinsip kolaborasi. Selanjutnya, *planning* yaitu proses dimana pengabdi dan masyarakat secara bersama-sama menyusun masalah yang akan dijawab, mengembangkan metode, serta rencana analisis. *Information gathering & analysis* berisi kegiatan pengumpulan informasi, analisis, dan interpretasi data. Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan pada CBR antara lain wawancara mendalam, dokumentasi, observasi, *focus group discussion* (FGD), *mapping* komunitas, *storytelling*, *trend change*, kalender musim, dan *matrix ranking*. Proses terakhir dari metode CBR adalah *acting on finding* dimana pengetahuan dimobilisasi. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagi informasi dan tindakan atas hasil riset (Hanafi et al., 2015).

Dalam pengabdian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah FGD. FGD melibatkan seluruh tim Pokja KMB Kecamatan Batang Anai yang berjumlah 14 orang, Pokja Kabupaten Padang Pariaman, Wali Nagari Sungai Buluah Barat dan Bamus serta Kerapatan Adat Nagari (KAN). Total jumlah peserta yang dilibatkan dalam penyusunan rencana kerja adalah 20 orang. FGD dilaksanakan selama dua hari berturut-turut. Adapun indikator keberhasilan program pengabdian ini adalah tersusunnya dokumen rencana strategis dan instrumen monev KMB secara partisipatif.

III. HASIL PENEMUAN DAN DISKUSI

Laying foundation merupakan langkah awal dalam pengabdian CBR. Pada tahapan ini disepakati tujuan dan pembagian peran secara bersama-sama antara pengabdi dan Pokja KMB. Diskusi dilakukan di KUA Kecamatan Batang Anai. Pada pertemuan ini Pokja menyampaikan kebutuhannya untuk asistensi penyusunan rencana kerja sehingga Pokja dapat menjalankan program KMB yang terarah dan terukur. Pengabdi berperan untuk memfasilitasi proses tersebut. Pada tahap awal ini juga disepakati prinsip-prinsip kerjasama antara pengabdi dengan Pokja KMB. Prinsip-prinsip tersebut adalah partisipatif, kesetaraan, kemandirian dan keberlanjutan.

Tahapan selanjutnya adalah *planning*. Pada tahap ini, pengabdi dan Pokja KMB secara bersama-sama menyusun masalah riset, mengembangkan metode, serta rencana analisis data. Berdasarkan hasil beberapa kali diskusi dengan Ketua Pokja dan Anggota Pokja secara terpisah, diidentifikasi masalah utama Pokja KMB adalah persoalan penyusunan rencana kerja. Baik ketua maupun anggota Pokja kebingungan harus mengerjakan apa. Selain itu, mereka juga bingung bagaimana akan berkegiatan karena Pokja KMB sendiri tidak mempunyai anggaran

kegiatan. Selain persoalan di atas, penting juga untuk mengukur keberhasilan program KMB agar apa yang dilakukan memiliki dampak yang jelas bagi masyarakat.

Dalam rangka menjawab persoalan tersebut disepakati bahwa Pokja secara bersama-sama akan menyusun rencana kerja dengan melibatkan *stakeholder* yang ada melalui FGD. Teknik analisis yang digunakan dalam menyusun strategi penguatan kelembagaan adalah analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats*). Analisis SWOT lazim dipakai dalam penyusunan rencana strategis (Sasoko & Mahrudi, 2023). Melalui analisis SWOT akan diidentifikasi lingkungan internal Pokja (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal Pokja (peluang dan ancaman). Dari hasil pemetaan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman tersebut, kemudian dirumuskan tindakan strategis yang akan diturunkan menjadi rencana kerja. Metode ini diperkenalkan kepada Pokja untuk kemudian dapat digunakan secara bersama-sama.

Selain menggunakan analisis SWOT, analisis *stakeholder* juga dapat digunakan dalam penyusunan rencana strategis. Analisis *stakeholder* bertujuan untuk memetakan kepentingan aktor-aktor kunci yang terlibat dalam proses perencanaan strategis (Fortega, 2022). Keterlibatan tokoh-tokoh tersebut dapat secara langsung maupun tidak, namun dapat mempengaruhi jalannya program. *Stakeholder* dapat memberikan dukungan namun bisa juga tantangan atau kemungkinan terjadinya disfungsi peran yang berdampak negatif terhadap program. Oleh karena itu, untuk mendukung analisis SWOT diperlukan analisis *stakeholder* juga (Zam Masrurun & Meutia Nastiti, 2023).

Tahapan ketiga dalam CBR adalah *information gathering & analysis*. Tahapan ini berisi kegiatan pengumpulan informasi, analisis, dan interpretasi data. Teknik pengumpulan data yang digunakan di sini adalah *focus group discussion* (FGD). FGD biasanya diikuti oleh kelompok kecil yang cenderung homogen dan mendalami topik yang akan dibahas. Topik pembahasan dalam hal ini adalah penyusunan rencana kerja KMB Kecamatan Batang Anai. Dalam FGD ini pengumpulan data dilakukan melalui *brainstorming* dan diskusi kelompok. *Brainstorming* dilakukan untuk mengetahui kondisi *existing* Pokja setelah satu tahun terbentuk. Pemetaan ini penting untuk dilakukan sebagai refleksi bagi anggota Pokja dan menjadi dasar pijakan dalam merancang program ke depan. Pertanyaan yang didiskusikan adalah apa yang sudah dilakukan serta apa yang masih belum dilakukan.

Tabel 1. Kondisi *Existing* Pokja KMB Kecamatan Batang Anai

Hal yang sudah dilakukan	Hal yang belum dilakukan atau belum optimal dilakukan
1. <i>Launching</i> KMB	1. <i>Benchmarking</i> ke KMB lain untuk mendapatkan tolak ukur
2. Pemasangan plang nama di sekretariat KMB (Kantor Wali Nagari)	2. Sosialisasi moderasi beragama belum sampai ke masyarakat secara luas
3. Membuat profil KMB	3. Sejumlah persoalan belum terespon dengan baik, seperti: masalah pelajaran agama Kristen tidak difasilitasi di sekolah negeri sementara gereja tidak punya ruang belajar dan tidak mendapat izin untuk pendirian ruang belajar
4. FGD dengan <i>stakeholder</i> untuk mendapatkan dukungan	4. Komunikasi dan koordinasi lintas <i>stakeholder</i> belum optimal
5. Menghadiri kegiatan FKUB	
6. Melakukan kegiatan dialog kerukunan	
7. Memfasilitasi rapat renovasi gereja	
8. Mensosialisasikan moderasi beragama kepada kelompok binaan seperti KWT, PKK, Majelis Taklim, dan lain-lain	

Berdasarkan hasil curah pendapat yang disajikan pada tabel 1 dapat dilihat bahwa Pokja KMB berperan aktif sejak berdirinya mulai dari kegiatan untuk mendapatkan dukungan *stakeholder*, sosialisasi moderasi beragama kepada masyarakat hingga memfasilitasi dialog dan musyawarah lintas agama. Di sisi lain, dari hasil refleksi diri, mereka merasa bahwa sosialisasi yang dilakukan belum menjangkau masyarakat luas, koordinasi lintas *stakeholder* masih lemah serta beberapa isu sensitif belum bisa direspon dengan baik.

Setelah kondisi Pokja KMB diidentifikasi, peserta dibagi menjadi 3 kelompok untuk membahas 3 topik yang berbeda. Sebelumnya peserta sudah dibagi berdasarkan kapasitas yang dimiliki untuk menjawab topik yang akan diberikan.



Gambar 1: Dokumentasi Kegiatan Diskusi Kelompok

Gambar 1 menunjukkan proses pelaksanaan FGD yang dilakukan secara partisipatif. Seluruh peserta dilibatkan secara aktif melalui diskusi kelompok. Hasil diskusi kelompok kecil kemudian dipresentasikan di depan peserta lainnya dan mendapatkan umpan balik.

Topik yang diberikan kepada kelompok untuk didiskusikan adalah analisis internal organisasi (untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan), analisis isu strategis (untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang), serta analisis *stakeholder* (untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan). Selain identifikasi topik masing-masing, setiap kelompok juga diminta untuk merumuskan tindakan strategis berdasarkan temuan masing-masing. Setelah diskusi kelompok kecil selesai, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya untuk diberikan masukan oleh kelompok lain. Peran pengabdian adalah sebagai fasilitator yang memandu jalannya proses diskusi sesuai dengan target yang diharapkan.

Tabel 2. Hasil Analisis Internal Organisasi

Aspek institusi	Kekuatan	Kelemahan	Tindakan strategis	Sumber daya yang dibutuhkan
1. SDM	- ASN - Sudah pernah pelatihan KMB - Sudah pernah ikut lomba	- Pemahaman kurang merata - Kemauan dan komitmen kurang	- Diskusi rutin - Pelatihan - Studi tiru	- Dana

Aspek institusi	Kekuatan	Kelemahan	Tindakan strategis	Sumber daya yang dibutuhkan
2. Keuangan	moderasi beragama tingkat nasional - Ada anggaran dana moderasi beragama di Pokja Kabupaten	- Kurang mendapat dukungan dari eksternal - Tidak ada dana kegiatan moderasi beragama di Pokja Kecamatan	- Kolaborasi dengan UIN, FKUB, Kanwil, dll - Proposal dana	- Jaringan

Analisis internal organisasi (tabel 2) menemukan bahwa persoalan utama Pokja KMB terletak pada aspek sumber daya manusia (SDM) dan keuangan yang merupakan dua aspek yang krusial dalam sebuah organisasi. Masih lemahnya komitmen SDM serta belum meratanya pemahaman mereka tentang moderasi menjadi persoalan utama yang dihadapi Pokja KMB. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas dan komitmen SDM Pokja KMB masih menjadi hal yang penting untuk dilakukan melalui pelatihan, diskusi rutin dan termasuk studi tiru. Hal ini dikarenakan SDM memegang peran yang penting untuk mencapai pertumbuhan dan kesinambungan organisasi karena kualitas dan kinerja SDM berdampak pencapaian visi dan misi organisasi (Basuki, 2023).

Selain SDM, persoalan keuangan adalah masalah utama yang banyak dihadapi oleh organisasi-organisasi nirlaba. Oleh sebab itu, diversifikasi sumber pendanaan diperlukan untuk memastikan keberlanjutan organisasi, termasuk menjalin kemitraan dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga lokal. Diversifikasi menjadi sangat penting karena dapat menunjang penyediaan layanan, meningkatkan program, dan menjamin ketersediaan dana untuk mencapai tujuan-tujuan lain oleh organisasi (Andhityawati & Darma, 2022).

Tabel 3. Hasil Analisis Isu Strategis

No	Isu yang Berkembang	Akibat Langsung	Tantangan	Peluang	Tindakan Strategis
1.	Fasilitas pendidikan bagi siswa katolik yang tidak terpenuhi	Pendidikan agama siswa tidak optimal	Butuh ruang belajar non formal atau guru agama katolik di sekolah formal	Adanya elit dan masyarakat yang toleran	Koordinasi dengan pemerintahan di level terbawah sampai ke Dinas Pendidikan
2.	Renovasi gereja BNKP	Kenyamanan beribadah bagi jemaah	Adanya beberapa masyarakat yang masih berfikir eksklusif	Adanya elit dan masyarakat yang toleran	Koordinasi dengan nagari dan KAN

No	Isu yang Berkembang	Akibat Langsung	Tantangan	Peluang	Tindakan Strategis
3.	Izin melaksanakan ibadah Bersama di rumah warga yang disebut dengan rumah doa	Kenyamanan beribadah	Adanya beberapa masyarakat yang masih berfikir eksklusif	Adanya elit dan masyarakat yang toleran	Koordinasi dengan nagari dan KAN
4.	Pemahaman sebagian masyarakat yang masih kurang moderat	Terhambatnya interaksi dan komunikasi serta terhambat program-program moderasi beragama	Adanya beberapa masyarakat yang masih berfikir eksklusif	Adanya elit dan masyarakat yang toleran	Sosialisasi dan penyuluhan
5.	Media & pendatang	Provokasi keributan	Komunikasi	Adanya elit dan masyarakat yang toleran	Koordinasi

Dalam diskusi isu strategis sebagaimana disajikan pada tabel 3, kelompok tokoh agama Kristen dan Katolik memunculkan beberapa isu yang selama ini menjadi persoalan mereka. Masalah utamanya terkait dengan peribadatan dan pendidikan agama. Masalah renovasi dan pembangunan gereja masih menjadi isu yang sensitif di tengah masyarakat. Pendidikan agama Kristen dan Katolik di sekolah juga belum terfasilitasi dengan baik. Persoalan semacam ini banyak dialami oleh masyarakat minoritas di wilayah Indonesia. Kondisi ini diperburuk oleh masih adanya masyarakat yang tidak toleran dan eksklusif. Di sisi lain, sejumlah elit dan anggota masyarakat sudah menunjukkan sikap toleran yang dapat dijadikan sebagai agen perubahan untuk menyebarluaskan praktik toleransi beragama.

Toleransi menjadi penting untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif dan harmonis agar masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda bisa hidup berdampingan tanpa diskriminasi dan konflik (Rusmiati, 2023). Nilai-nilai toleransi, kerjasama, saling menghargai dapat berperan sebagai modal sosial untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai dalam kemajemukan (Siswanto et al., 2024). Realisasinya harus diwujudkan dalam dimensi sosial, politik dan pendidikan (Saputera & Djauhari, 2021). Oleh sebab itu, persoalan-persoalan yang diidentifikasi di atas harus direspon agar tidak menjadi konflik manifes di kemudian hari dan tentu saja hal tersebut membutuhkan komitmen seluruh pihak yang terkait.

Tabel 4. Hasil Analisis *Stakeholder*

<i>Stakeholder</i>	<i>Mendukung karena</i>	<i>Tindakan strategis</i>
1. Wali Nagari & BAMUS	- Kewajiban memenuhi hak azazi sebagai warga Masyarakat - Adanya penyediaan alokasi anggaran nagari dan kebijakan - PERNA dan PERWAN	- Memberikan ruang kepada Masyarakat untuk melaksanakan kegiatan moderasi - Tersedianya anggaran untuk melakukan kegiatan nigari - Lahirnya PERNA tentang transaksi jual beli tanah dengan warga pendatang
2. KAN, PKK, Majelis Taklim, LPM, Karang Taruna, IGM Nagari	- Modal sosial untuk mewujudkan moderasi beragama pada generasi muda yang harmoni	- Mengajarkan dan memperkenalkan moderasi beragama
3. DPRD	- Punya anggaran dana	- Lobi
4. Babinkamtibmas, Babinsa, dan Polsek	- Menjaga kerukunan dan kedamaian melalui penegakan hukum	- Koordinasi
5. MKKS	- Bisa berkomunikasi ke dinas terkait pendidikan agama anak nonmuslim	- Koordinasi

Analisis *stakeholder* bertujuan memetakan mitra strategis Pokja KMB yang berpotensi untuk diajak kerjasama agar tujuan KMB dapat tercapai. Hasil analisis *stakeholder* pada tabel 4 mengidentifikasi sejumlah mitra strategis KMB diantaranya Wali Nagari, Bamus, KAN, PKK, Majelis Taklim, Karang Taruna, IGM Nagari, DPRD, Babinkamtibmas, Babinsa, Polsek, dan MKKS. Namun yang menjadi persoalan adalah dukungan pemerintah dan *stakeholder* yang terkait masih minim, terutama dalam bentuk kebijakan serta program yang mendukung moderasi beragama.

Hal serupa juga dialami Kampung Moderasi Beragama Oeleta Kota Kupang, koordinasi dan sinergi antar instansi pemerintah dan *stakeholder* terkait juga dipandang masih kurang (Tokan, 2024). Padahal, mewujudkan keharmonisan hidup beragama adalah tanggung jawab bersama. Oleh sebab itu, koordinasi dan sinergi antara pihak-pihak yang terkait perlu terus ditingkatkan karena menyebarkan pesan-pesan moderasi beragama tidak hanya tugas Pokja KMB. *Stakeholder* juga dapat berperan dan bersinergi dalam menyiarkan moderasi beragama (Yusuf & Mutiara, 2022).

Kampung Moderasi Beragama Pakelan dapat menjadi contoh sinergi antar *stakeholders* dalam memperkuat moderasi beragama. Pemerintah desa dan institusi pendidikan yang ada di sana secara aktif menyelenggarakan penyuluhan terkait urgensi moderasi beragama. Mulai dari sekolah dasar hingga menengah, serta institusi pendidikan non formal mensosialisasikan nilai-nilai toleransi, kerukunan, dan perdamaian secara rutin. Di samping itu, para tokoh agama juga turut dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan moderasi beragama (Wulandari et al., 2024). Pada tahapan berikutnya, setiap peserta menuliskan hasil yang diharapkan dari tindakan-tindakan strategis yang sudah dirumuskan sebelumnya. Berdasarkan hasil yang diharapkan tersebut, menggunakan *logical framework analysis* (LFA), disusun rumusan *output* (hasil jangka pendek), *outcome* (hasil jangka menengah) dan *goal* (hasil jangka panjang) yang ingin

[illegible]

Gambar 2 adalah pohon hasil LFA. Pada bagian atas adalah tujuan jangka panjang Pokja KMB, yaitu "Terwujudnya Masyarakat Nagari Sungai Buluah Barat yang Moderat, Rukun dan Damai". Di bawahnya, terdapat tiga *outcome* yang dirumuskan yaitu: meningkatnya kualitas sumber daya manusia Pokja KMB, meningkatnya kesetaraan dan toleransi beragama di Nagari Sungai Buluah Barat, dan terbangunnya jejaring moderasi beragama di tingkat lokal hingga nasional. Masing-masing *outcome* ditunjang oleh beberapa *output*. Adapun *output* yang dirumuskan secara umum yaitu: meningkatnya pemahaman dan kesadaran moderasi beragama Pokja KMB dan masyarakat, meningkatnya wawasan Pokja KMB tentang Kampung Moderasi Beragama, meningkatnya kader-kader penggerak moderasi beragama, terciptanya ruang dialog antar agama di Nagari Sungai Buluah Barat, meningkatnya materi publikasi dan sosialisasi moderasi beragama, meningkatnya sumber pendanaan Pokja KMB untuk kegiatan moderasi beragama serta meningkatnya dukungan dan kerjasama dengan lintas *stakeholder*.

Setelah pohon hasil berhasil disusun, selanjutnya dilakukan penyusunan visi dan misi Pokja KMB Kecamatan Batang Anai. Visi yang disepakati adalah "Terwujudnya Masyarakat Sungai Buluah Barat yang Moderat, Rukun dan Damai". Untuk mencapai visi tersebut, maka disusun misi sebagai berikut: 1) Meningkatkan wawasan multikultural dan moderasi beragama; 2) Meningkatkan kerukunan umat beragama; 3) Meningkatkan kualitas layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata.

Page | 288

diambil dari Pedoman Pembentukan Kampung Moderasi Beragama yaitu: a) Persentase masyarakat yang telah menerima sosialisasi moderasi beragama dan banyaknya kelompok yang menjadi sasaran; b) Terbentuknya sekretariat KMB; c) Jumlah dukungan stakeholders terhadap KMB; d) Jumlah program kerja/kegiatan aktif yang mengusung nilai moderasi beragama (Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 137 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pembentukan Kampung Moderasi Beragama, 2023). Sementara itu, monev indeks moderasi beragama masyarakat diukur dengan 4 indikator moderasi beragama, yaitu: komitmen kebangsaan, anti kekerasan, toleransi dan penghormatan terhadap tradisi (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).



Gambar 3: Dokumentasi Penyusunan Instrumen Monev

Gambar 3 merupakan dokumentasi kegiatan penyusunan instrumen monev moderasi beragama. Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan anggota Pokja KMB Kecamatan Batang Anai dan Pokja KMB Kabupaten Padang Pariaman.

Kampung Moderasi Beragama (KMB) sudah menjadi kebijakan yang mesti diimplementasikan. Kebijakan ini tentu tidak sebatas formalitas saja, mengingat moderasi beragama menjadi jalan penting dalam menciptakan kedamaian dan kerukunan di tengah masyarakat. Penguatan kelembagaan Pokja KMB menjadi langkah penting dalam memastikan keberlanjutan program moderasi beragama. Fokus utama dari penguatan ini adalah membentuk kelembagaan yang kokoh, didukung oleh Anggota Pokja yang memiliki pemahaman dan keterampilan yang mendalam untuk mengelola serta melaksanakan kegiatan moderasi. Kapasitas kelembagaan yang kuat, dimana Pokja KMB memiliki kemampuan menyusun rencana kerja strategis dan mengelola kegiatan jangka panjang, akan mendorong terlaksananya program yang lebih efektif guna mencapai tujuan KMB. Sebab perencanaan strategis memberikan arah sehingga manajemen organisasi dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien (Nahrowi, 2017).

Selain penyusunan rencana kerja yang partisipatif, Pokja KMB Kecamatan Batang Anai juga telah merumuskan strategi penguatan kelembagaan melalui pemetaan sumber pendanaan alternatif dan kolaborasi strategis dengan *stakeholder*, seperti dana desa, pokir, Dinsos, NGO, CSR perusahaan, perguruan tinggi dan lain sebagainya. Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa Pokja tidak hanya bergantung pada satu sumber dana dan memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam pelaksanaan program moderasi beragama. Oleh sebab itu, peningkatan koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan juga menjadi fokus utama untuk memperluas dukungan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya moderasi beragama. Dialog lintas *stakeholder*, misalnya, dapat menjadi sarana mempererat dukungan berbagai pihak dalam mewujudkan nilai-nilai moderasi dan meredam potensi konflik di masyarakat.

Evaluasi awal pasca kegiatan menunjukkan bahwa Anggota Pokja konsisten mensosialisasi moderasi beragama kepada masyarakat sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Berdasarkan laporan Anggota Pokja, sekitar 80% masyarakat Nagari Sungai Buluah Barat sudah mendapatkan sosialisasi moderasi beragama. Moderasi beragama masyarakat juga menjadi lebih baik yang ditandai dengan perayaan natal dan renovasi gereja kristen berjalan dengan lancar. Dialog lintas agama juga masih berjalan termasuk saling mengunjungi saat perayaan hari besar. Hal ini sejalan dengan indikator moderasi beragama yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penghargaan terhadap tradisi. Hanya saja, indeks moderasi beragama masyarakat masih perlu diukur secara ilmiah dengan menggunakan instrumen yang sudah disusun. Namun hal ini baru dapat dilakukan setelah, setidaknya, setahun program kerja berjalan.

IV. SIMPULAN

Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah dokumen, yaitu dokumen rencana strategis KMB Kecamatan Batang dan dokumen monitor dan evaluasi (monev) yang merupakan aspek penting dalam pengelolaan organisasi. Perencanaan strategis membantu dalam merumuskan rencana kerja yang terstruktur untuk mencapai tujuan jangka panjang yaitu terciptanya kedamaian dan kerukunan di Sungai Buluah Barat. Instrumen monev membantu Pokja dalam mengukur ketercapaiannya. Capaian lain dari kegiatan pengabdian ini adalah meningkatnya kemampuan anggota Pokja dalam memetakan sumber-sumber pendanaan alternatif untuk menjalankan program KMB serta memaksimalkan sumber daya yang dimiliki agar dapat melaksanakan rencana kerja yang sudah dibuat. Aspek organisasi yang belum tersentuh pengabdian ini adalah aspek kepemimpinan dan pengorganisasian termasuk budaya organisasi. Oleh sebab itu, rencana pendampingan selanjutnya akan fokus pada aspek-aspek tersebut melalui pelatihan *leadership* dan resolusi konflik, penyusunan *timeline* kegiatan dan penanggungjawab serta uji coba instrumen monev.

Selanjutnya, saran kepada Pokja KMB untuk dapat menjalankan program-program yang sudah direncanakan dengan baik. Pihak-pihak yang berkepentingan juga diharapkan dapat saling mendukung dan bersinergi dalam memelihara kerukunan dan kedamaian di Nagari Sungai Buluah Barat. Untuk pengabdian berikutnya disarankan fokus pada kegiatan penguatan moderasi beragama yang langsung melibatkan masyarakat agar indeks moderasi beragama masyarakat dapat diukur secara langsung.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada LP2M UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan hibah pengabdian sehingga kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pokja KMB Kecamatan Batang Anai, Pokja KMB Kabupaten Padang Pariaman, Pemerintahan Nagari Sungai Buluah Barat, Kerapatan Adat Nagari, tokoh agama, tokoh masyarakat dan semua pihak yang telah bekerjasama dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini sehingga apa yang menjadi tujuan pengabdian ini dapat tercapai.

Daftar Pustaka

Amalia, L. D., Montessori, M., & Indrawadi, J. (2019). Kerjasama antara Etnis Minangkabau dan Etnis Nias dalam Konteks Sosial Budaya di Nagari Sungai Buluah Barat. *Journal of Civic Education*, 2(1), 46-55. <https://doi.org/10.24036/jce.v2i1.107>

- Andhityawati, K. W., & Darma, G. S. (2022). Faktor Kunci Keberlanjutan Organisasi Nirlaba di Bali. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 19(2), 233–259. <https://doi.org/https://doi.org/10.38043/jmb.v19i2.4610>
- Ashadi, A., Sefriyono, S., & Irwansyah, A. (2022). Adat Space in Muslim-Christian Conflict Resolution at Minang Realm, West Sumatera, Indonesia. *Khazanah Sosial*, 4(4), 781–796. <https://doi.org/10.15575/ks.v4i4.23504>
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama* (1st ed.). Kementerian Agama RI.
- Basuki, N. (2023). Mengoptimal Modal Manusia: Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia yang Efektif untuk Pertumbuhan Organisasi yang Berkelanjutan. *KOMITMEN: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 4(2), 182–192.
- Fortega, G. F. D. (2022). Perencanaan Strategis Sumber Daya Manusia pada Industri Perbankan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 65–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.56145/ekonomibisnis.v2i2.43>
- Hanafi, M., Naili, N., Salahuddin, N., Kemal Riza, A., Fikri Zuhriyah, L. M., Rakhmawati, Ritonga, I., Muhid, A., & Dahkelan. (2015). Community Based Research: Panduan Merancang dan Melaksanakan Penelitian Bersama Komunitas. *LPPM UIN Sunan Ampel Surabaya*, 1–146. <http://lp2m.iain-palangkaraya.ac.id/wp-content/uploads/2017/04/3.-Pengantar-CBR-cover.pdf>
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 137 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pembentukan Kampung Moderasi Beragama (2023).
- Lestari, N. D. (2024). Program Kampung Moderasi Beragama (KMB) sebagai Perwujudan Toleransi Antar Umat Beragama di Desa Ngablak. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 77–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.51651/pjpm.v4i3.514>
- Nahrowi, M. (2017). Perencanaan Strategis dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah. *FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman*, 8(1), 53–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.36835/falasifa.v8i1.38>
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (1999). *Manajemen* (6th ed.). Prentice Hall, Inc.
- Rusmiati, E. T. (2023). Penanaman Nilai-Nilai Toleransi pada Anak Usia Dini. *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(2), 248–256. <https://doi.org/10.32509/abdimoestopo.v6i2.3077>
- Sakir, A. R., Badruzaman, D., Supangat, Fadri, Z., Adialita, T., Mirsal, Pandoyo, Kusmendar, Nadia Sasmita Wijayanti, Anaconda Bangkara, La Jaali, & Ria Elsani Intanku Nafie. (2024). *Manajemen dan Kepemimpinan* (A. Susanto, Ed.; 1st ed.). Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Saputera, A. R. A., & Djauhari, M. S. H. (2021). Potret Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Gorontalo. *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama*, 1(1), 41–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/moderatio.v1i1.3351>
- Sasoko, D. M., & Mahrudi, I. (2023). Teknik Analisis SWOT dalam Sebuah Perencanaan Kegiatan. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 22(1), 8–19. <http://ejournal-jayabaya.id/Perspektif/article/view/64>
- Siswanto, Aksa, A. H., Sahrudin, M. I. M., & Wafa, M. S. (2024). Kampung Moderasi Beragama; Merajut Kerukunan Umat Beragama Melalui Modal Sosial di Desa Tempur.

- NAJWA: *Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1).
<https://doi.org/10.30762/najwa.v2i1.259>
- Susilawaty, A., Tasruddin, R., Ahmad, D., & Salenda, K. (2016). *Panduan Riset berbasis komunitas (Community Based Research)*. Nur Khairunnisa.
- Tokan, G. (2024). Kerukunan Umat Beragama di Kampung Moderasi Beragama Oeleta-Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, 3(1), 113-121.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61860/jigp.v3i1.148>
- Ulfah, M., & Fitria, A. (2024). Asistensi Penguatan Kampung Moderasi Beragama di Nagari Sungai Buluh Barat Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. *E-DIMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 15(4), 782–788.
<https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.26877/e-dimas.v15i4.19072>
- Wulandari, P., Huda, M. T., Mujib, A., Sakinah, S., Humaidi, Z., Putri, A. S., & Muna, A. N. (2024). Potret Kampung Moderasi Beragama Kelurahan Pakelan, Kota Kediri. *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 18(1), 137–153.
<https://doi.org/10.56997/almabsut.v16i2.686>
- Yusuf, M. Z., & Mutiara, D. (2022). Diseminasi Informasi Moderasi Beragama: Analisis Konten Website Kementerian Agama. *Dialog*, 45(1), 127–137.
<https://doi.org/10.47655/dialog.v45i1.535>
- Zam Masrurun, Z., & Meutia Nastiti, D. (2023). Analisis Stakeholders dalam Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 17(1), 99–118. <https://doi.org/https://doi.org/10.47608/jki.v17i12023.99-118>